BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Keberlanjutan suatu perusahaan sangat bergantung dari para *stakeholdersnya. Stakeholders* diartikan sebagai para pemangku kepentingan perusahaan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini juga berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan salah satunya pengungkapan CSR perusahaan.

Konsep pemangku kepentingan pada awalnya didefinisikan sebagai "kelompok-kelompok tanpa dukungan yang organisasi tidak akan berhenti ada." Daftar pemangku kepentingan awalnya termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman dan masyarakat Freeman (2010: 32)

Ramizes (2014), mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder.* Salah satunya Friedman mendefinisikan *stakeholder* sebagai "*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives."* Didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholder theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Chan et al (2013) menjelaskan bahwa dalam manajemen strategi *stakeholder,* perusahaan yang efektif akan

memperhatikan seluruh hubungan dengan *stakeholder* yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, untuk terciptanya hubungan yang baik dengan para *stakeholder*, perusahaan sebaiknya memenuhi permintaan *stakeholder* jika sumber daya yang mereka menjadi kontrol yang penting untuk keberlangsungan operasi perusahaan.

Rencana strategis perusahaan dalam membina hubungan dengan *stakeholder* dapat dilakukan dengan upaya peningkatan reputasi perusahaan, salah satunya adalah dengan pengungkapan aktivitas CSR perusahaan. Jika aktivitas CSR dipandang sebagai upaya strategis perusahaan dalam memenuhi keinginan *stakeholder*, maka masuk akal bila ada hubungan yang positif antara *stakeholder* dan pengungkapan CSR (Roberts, 1992 dalam Chan et al, 2013)

2.1.2 *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori Legitimasi merupakan proses berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi ukuran kinerja lainnya yang berkaitan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan legitimasi perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial. Kegagalan untuk memenuhi harapan masyarakat akan mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kemudian akan berdampak terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan (Indrayenti dkk : 2018)

Erna &Kurniawati (2018) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu, legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan berada. Kedua teori baik *legitimacy theory* dan *stakeholders theory* merupakan teori yang menjelaskan motivasi para manajer atau organisasi untuk melakukan pengungkapan laporan berkelanjutan. Jika teori stakeholders dimotivasi oleh pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, maka teori legitimasi menggunakan motivasi untuk mendapatkan pengesahan atau penerimaan dari masyarakat.

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

2.1.3.1 Definisi Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Menurut Nasrum&Andi (2018:4) mendefinisikan corporate governance sebagai sebuah struktur dan proses dalam menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan.

> Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :
>
> *"The internal means by which corporation are operated and controlled,which involve a set of relationship between a company's management, its board, its shareholder and other stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determine. Good corporate governance*

should provide proper incentives for the board and management to persue objectives that are in the interests of the company and shareholders and should facilitate effective monitoring, thereby encouraging firms to use resources more efficiently."

Menurut Lawrence J.Gitman (2006:16) mendefinisikan *coporate governance* sebagai berikut :

"*Corporate Governance is the system used to direct and control a corporation. Defines the rights and responsibilities of key corporate participants, decision making prosedures, and the way in which the firm will set, achive and monitor its objectives."*

Menurut Achmad Lamo (2012:70) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

"*corporate governance* adalah proses penyelengaraan kegiatan pemerintahan dengan mengambil alih atau mengitimasi prinsip-prinsip yang ada di sektor privat, keterbukaan informasi, integrittas individu, peran yang lebih jelas dan akuntabilitas yang tinggi."

Menurut Achmad Lamo (2012:102) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

" *corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan serta sebagai suatu rangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*)."

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian corporate governance adalah proses dan sistem yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta nilai perusahaan.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Achmad Lamo (2012:103) terdapat beberapa prinsip dalam implementasi *good corporate governance* (GCG). Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia, terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *good corporate governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* serta *fairness* yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. *Tranparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukuan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, termasuk tentang kegiatan CSR.
2. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban orgam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam peneglolaan perusahaan dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku
4. *Independency* (Kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koporasi yang sehat
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dari prinsip-prinsip *corporate governance* diatas berikut adalah indikator tata kelola perusahaan yang baik berikut daftar indikatornya :

Tabel 2.1

Daftar Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Pilar	Indikator
1	Keterbukaan	1. Waktu penerbitan laporan keuangan 2. Visi perusahaan 3. Misi perusahaan 4. Sasaran perusahaan 5. Strategi perusahaan 6. Kondisi keuangan 7. Susunan pengurus 8. Kompensasi pengurus 9. Pemegang saham pengendali 10. Pejabat eksekutif 11. Pengelolaan risiko 12. Sistem pengaawasan dan pengendalian intern 13. System pelaksanaan GCG 14. Kejadian penting 15. Kepemilikan saham komisaris 16. Hubungan keluarga dan hubungan keuangan dewan komisaris dengan pihak lain
2	Akuntabilitas	1. Jumlah komite audit 2. Reward dan punishment system
3	Responsibilitas	1. Kehati-hatian 2. Melaksanakan tanggungjawab social
4	Independensi	RUPS minimal 1 kali dalam satu tahun

2.1.3.3 Pengukuran Tata Kelola Perusahaan

Pengukuran kualitas tata kelola perusahaan bisa dilakukan dengan berbagai metode diantaranya perusahaan yang menjadi peserta CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) dan dilakukan oleh IICG bekerja sama dengan majalah SWA dengan nilai cukup terpercaya, terpercaya atau sangat terpercaya dan penilaian melalui indikator tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan penilaian melalui indikator tata kelola perusahaan yang baik dengan indikator sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional (KI)

   Kepemilikan institusional dihitung dengan membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional (bank, dana pension,perusahaan, asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya) dengan jumlah saham yang beredar. Mengukur variabel ini sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

2. Ukuran Komisaris Independen

   Ukuran komisaris independen adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris independen. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini ukur dengan mengukur dewan komisaris independen yang disebutkan dalam laporan tahunan (Said et al., 2009).

$$PDKI = \frac{\text{DK luar}}{\text{UDK}} \times 100\%$$

   Keterangan:

   PDKI : Proporsi dewan komisaris independen

   DK luar : Jumlah anggota dewan komisaris berasal dari luar perusahaan

   UDK : Ukuran dewan komisaris

3. Ukuran Dewan Komisaris

   Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung

dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan (Said et al., 2009).

$$UDK = \sum \text{Dewan Komisaris Perusahaan}$$

Keterangan:

UDK : Ukuran Dewan Komisaris

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan atau memperoleh laba/keuntungan dalam suatu periode tertentu. Berikut pengertian profitabilitas menurut beberapa ahli :

Menurut Hery (2017:7) mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut :

> "Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Ukuran profitabilitas dapat dibagi menjadi berbagai indikator, seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pembelian investasi atau asset, dan tingkat laba pengembalian ekuitas pemilik."

Menurut Agus Sartono (2015:122) mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut :

> "Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen."

Menurut Singh (2016:334) menyatakan profitabilitas adalah sebagai berikut:

> "*Profitability refers to the ability of a bussiness to earn profit. It show the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company."*

Dengan demikian, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin dan kegiatan mensejahterakan masyarakatpun akan berlanjut pula. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada.

2.1.4.2 Definisi Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2017:7) mendefinisikan sebagai berikut :

> "Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka Panjang, karena profitabilitas menunjukan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak serta bisa atau tidaknya perusahaan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perusahaannya."

2.1.4.3 Tujuan rasio profitabilitas

Tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya."

2.1.4.4 Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio pofitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihakpihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.5 Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:115) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya:

1. Profit Margin (Profit Margin on Sale).
2. Return on Investment (ROI).
3. Return on Equity (ROE).
4. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share).
5. Rasio Pertumbuhan.

Dari kutipan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profit Margin(Profit Margin on Sales)

   Profit Marginon Sale atau Rasio Margin atau Margin laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membanding antara

laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.

Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax}{Sales}$$

(Kasmir 2014:136)

2. Return on Investment (ROI)

   Hasil pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment (ROI) atau Return on Total Assets, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax}{Total\ Assets}$$

(Kasmir 2014:136)

3. Return on Equity (ROE)

   Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal

sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax}{Equity}$$

(Kasmir 2014:137)

4. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share)

   Rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{laba Saham Biasa}}{Saham\ Biasa\ yang\ beredar}$$

(Kasmir 2014:137)

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengembalian dari investasinya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin dan Net Profit Margin.

Rasio profitabilitas menurut Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield (2014:214) sebagai berikut :

1 *Profit Margin on Sales*

Measures net income generated by each dollar of sales. Berikut rumusnya :

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{Net\ Income}{Net\ Sales}$$

(Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield 2014:214)

2 Return on Assets

Measures overall profitability of assets. Berikut rumusnya :

$$\text{Return on Assets} = \frac{Net\ Income}{Average\ total\ Assets}$$

(Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield 2014:214)

3 *Return on share capital-ordinary*

Measures profitability of owners' investment. Berikut rumusnya :

$$\textit{Return on share capital-ordinary} = \frac{Net\ income\ minus\ preference\ dividends}{Average\ shareholders'equity-ordinary}$$

(Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield 2014:214)

4 *Earning per-share*

Measures net income earned on each ordinary share. Berikut rumusnya :

$$\textit{Earning per share} = \frac{Net\ income\ minus\ preference\ dividends}{Weighted-average\ number\ of\ shares\ outstanding}$$

(Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield 2014:214)

5 *Price Earnings Ratio*

Measures the ratio of the market price per share to eranings per share

$$Price\ Earnings\ Ratio = \frac{Market\ \ Price\ per\ share}{Earning\ per\ share}$$

(Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield 2014:214)

6 *Payout Ratio*

Measures percentage of eranings distributed in the form of cash dividens. Berikut rumusnya :

$$Payout\ Ratio = \frac{Cash\ dividens}{Net\ Income}$$

(Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield 2014:214)

Dari semua rasio profitabilitas di atas, penulis hanya akan menggunakan *return on equity* sebagai alat ukur profitabilitas. Hal ini didasarkan hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. makin tinggi rasio ini, makin baik artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat

2.1.5 *Corporate Social Responsibility*

2.1.5.1 Definisi *Corporate Social Responsibility*

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah untuk mendaptkan profit sebanyak-banyaknya karena tanpanya perusahaan tidak akan berjalan namun pada kenyataan masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan CSR.

Berikut adalah definisi *Corporate Social Responsibility* menurut para ahli :

Menurut Achmad lamo (2014:23) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut :

"*Corporate Social Responsibility* (CSR), bisa diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikan citranya di mata public dengan membuat program-program amal baik bersifat eksternal maupun internal."

Menurut *The Word Business Council for Sustainible Development* (WBCSD) (2014) sebagai beirkut :

"CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup."

Menurut Trinidad and Tabaco Bureau of Standards (TTBS) (2014) sebagai berikut :

"*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas ."

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007

"Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitan kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Berdasarkan uraian di atas menurut pemahaman penulis definisi *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya serta meningkatkan ekonomi di daerah perusahaan tersebut.

2.1.5.2 Manfaat CSR bagi Perusahaan

Dikutip dari jurnal ilmiah Herman (2018) Manfaat mengandung arti berguna atau berfaedah baik untuk individu sendiri maupun bagi orang lain atas keberadaan atau hal yang dilakukan. Dalam hal ini manfaat CSR juga demikian, bagaimana keberadaan perusahaan dapat berguna bagi masyarakat setempat, bagi perusahaan itu sendiri dan bagi pemerintah.

Menurut Wahyuningrum (2015:111) manfaat CSR Perusahaan yang telah meyakini CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan, maka dengan sendirinya perusahaan telah melaksanakan investasi sosial. Sebagai investasi sosial maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu:

1. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan.
2. Meningkatkan akuntabilitas, assessment dan komunitas investasi.
3. Mendorong komitmen karyawan. Karena mereka diperhatikan dan dihargai.
4. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.
5. Mempertinggi reputasi dan corporate building.

Menurut Mardikanto, (2014) menyampaikan beberapa alasan mengapa CSR perlu dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan citra perusahaan.
2. Lingkungan sosial yang lebih baik.
3. Meningkatkan kinerja karyawan

2.1.5.3 Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Sampai saat ini belum ada definisi pasti yang dapat didigunakan untuk menggambarkan pengungkapan corporate social responsibility hal ini disebabkan perkembangan pengungkapan CSR masih berada di tahap awal jika dibandingkan dengan praktik pelaporan keuangan. Sehingga, sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility).

Berikut definisi pengungkapan CSR menurut para ahli :

Menurut Andreas, Desmiyawati dkk (2015) menyatakan bahwa :

> "*Corporate Social Responsibility disclosure is the disclosure of all information related to social responsibility activities that have been implemented by companies. Corporate Social Responsibility disclosure was measured by Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI) which refers Global Report Initiatives (GRI) indicators."*

Bisa disimpulkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah pengungkapan informasi atas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan atau masyarakat luas.

Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini diatur oleh Bapepam dalam Peraturan Nomor X.K-6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia wajib mengungkapkan tanggung jawab sosialnya mengenai kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan terkait lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, pengembangan sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab produk. Informasi tersebut dapat diungkapkan baik pada

laporan tahunan ataupun laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan, seperti laporan keberlanjutan atau laporan tanggung jawab sosial.

2.1.5.4 *Global Reporting Initiatives* (GRI) sebagai Pedoman *Sustainibilty Report*

Global Reporting Initiatives (GRI) merupakan sebuah organisasi *non-profit* yang bergerak dalam bidang sustainability. Didirikan tahu 1997 di Boston, GRI menjadi pioneer dalam pengembangan pedoman *sustainability report* GRI mempromosikan penggunaan *sustainability report* sebagai salah satu cara organisasi untuk menjadi *sustainable* dan berkontribusi pada *sustainable development*.

Dalam perkembangannya, GRI telah beberapa kali menerbitkan pedoman *sustainability report* yang terus diperbaharui. *Sustainibility Reporting Framework* yang pertama diluncurkan pada tahun 2000 ketika GRI masih dalam pengawasan *Coalition for Enviromentally Responsible Economy* (CERES) dan *The Tellus Institute.* Selanjutnya yang kedua, pedoman dikenal sebagai G2 diterbitkan pada tahun 2002 pada *Word Summit on Sustainible Development* yang diselenggarakan di Johannesburg. Yang ketiga dari GRI *Sustainibility Reporting Framework* diluncurkan pada tahun 2006. Setelah G3 diterbitkan, GRI mengembangkan strategi dan pedoman pelaporannya, serta membangun aliansi dengan beberapa organisasi. Dampak dari aliansi ini adalah penegembangan pedoman *sustainability report* menjadi generasi G3-1, yaitu penyempurnaan dan pembaharuan dari G3, dengan pedoman yang lebih luas terhadap topik gender, komunitas, dan kinerja yang

berhubungan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya Mei 2013, GRI menerbitkan generasi keempat dari GRI *Sustanibility Reporting Framework,* yaitu G4 akhirnya tahun 2014 GRI menerbitkan menyediakan layanan verifikasi untuk keakuratan dan keselarasan Indeks Konten laporan berbasis G4 dan kemudian, versi taksonomi terbaru yang mencakup Pedoman G4, G3.1 dan G3, tahun 2015 menerbitkan Ujian G4 sebuah 60 pertanyaan, ujian pilihan ganda yang memungkinkan individu untuk mendapatkan akreditasi pada kemampuan mereka untuk menggunakan Pedoman G4 GRI dan yang terbaru pada tahun 2016 GRI standar global *sustainability report* pertama di 73 negara Dikembangkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Global (GSSB), Standar GRI memungkinkan semua organisasi untuk melaporkan secara publik tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosialnya - dan menunjukkan bagaimana mereka berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Standar GRI juga merupakan referensi tepercaya bagi para pembuat kebijakan dan regulator, dan memiliki struktur modular sehingga dapat terus diperbarui dan relevan. (www.globalreporting.org)

Dalam penelitian ini , pedoman *sustainability report* G4 akan digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur pengungkapan CSR. Berikut merupakan gambaran satandar pengungkapan pedoman *sustainability report* GRI G4

Tabel 2.2

Standar Pengungkapan *Sustainibility Report*

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegitan organisasi karena

		perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti
	EC4	Bantuan yang diterima dari finansial pemerintah
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula *(entry level)* menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan volume.
	EN2	Presentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas energi.
	EN6	Pengurangan konsumsi energy.
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi.
KATEGORI LINGKUNGAN		
Air	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air.
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali.

Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN *RED LIST* dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1).
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2).
	EN17	Emusi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3).
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
KATEGORI LINGKUNGAN		
Emisi	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO).
	EN21	NOx, Sox dan emisi udara signifikan lainnya.
Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
	EN23	Bobot total berdasarkan jenis dan metode pembuangan.

	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Basel 2 Lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut diimpor, diekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkutuntuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran dan status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori.
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
KATEGORI LINGKUNGAN		
Transportasi	EN30	Dampak lingkuuangan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja.
Lain-lain	EN31	Total pegeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
KATEGORI LINGKUNGAN		
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan

	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan actual dan potensial dalam rantai pastikan dan tindakan yang diambil.
Mekasnisme Pengaduan MasalahLingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekasnisme pangaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL **Sub Kategori : Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja**		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawanbaru dan *turnover* karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawa sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
KATEGORI SOSIAL		
Kesehatandan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komiite bersama formal manajemen- pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan

		mereka.
KATEGORI SOSIAL		
Kesehatandan Keselamatan Kerja	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja.
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per-tahun per-karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular menurut gender dan kategori kayawan.
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per-kategori karyaman menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya.
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktik ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang prakti ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL **Sub Kategori : Hak Asasi Manusia**		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan

		klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karryawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi.
Non Dsikriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkonstribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkonstribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentasi operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.
KATEGORI SOSIAL		
Asesmen atas Hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusai yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui pengaduan formal

KATEGORI SOSIAL Sub Kategori : Masyarakat		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, dampak & pengembangan
	SO2	Operasi dengan dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkaot dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total konstribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat.
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
Asesmen Pemasok atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat.
	SO10	Dampak negative aktual dan potensional yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
KATEGORI SOSIAL **Sub Kategori : Masyarakat**		
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	S011	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.

Sumber *:* *www.globalreporting.org* (data diolah)

2.1.5.5 Perhitungan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Untuk menghitung pengungkapan Corporate Social Responsibility menggunakan pendekatan yang telah digunakan oleh Haniffa dan Cooke (2005)

yaitu setiap item pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan pengungkapan Corporate Social Responsibility adalah sebagai berikut:

$$CSRIij = \frac{\sum Xij}{Nj}$$

Keterangan:

CSRIij = Corporate Social Responsibility indeks perusahaan j tahun i

∑ Xij = Jumlah item diungkapkan perusahaan

Nj = Jumlah item perusahaan j

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* :

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Fatimah, Makhdalena, Fenny Trisnawati (2012)	Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR	Hasil dari penelitian ini komisaris independent dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan

			CSR. Selanjutnya secara parsial komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sebesar 0,145924
2	Ria Puspitasari (2013)	Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi pada perusahaan Jakarta Islamic Index)	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa semua variable yaitu kepemilikan konstitusional, profitabilitas (ROE) dan komposisi dewan direksi secara bersamaan mempengaruhi variable dependen yaitu CSR secara signifikan
3	Dian Agustia (2012)	Pegaruh struktur kepemilikan dan dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR dan reaksi pasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, proporsi kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dan proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reaksi pasar. Proporsi kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar. Proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dalam upaya memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan, perusahaan harus memiliki pengetahuan atas segala konsekuensi kegiatan yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan *legitimacy theory* perusahaan dapat dikatakan dapat melakukan kegiatan operasinya bila kegiatan tersebut sejalan dengan kontrak sosial, dimana perusahaan dizinkan untuk mendapatkan sumber daya milik masyarakat namun perusahaan tidak mempunyai hak melekat terhadap sumber daya tersebut.

Corporate Governance didefinisikan oleh *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) sebagai suatu rangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan dapat dikatakan bahwa perusahaan harus menetapkan juga tujuan dan strategi yang digunakan untuk beroperasi dan mendapatkan izin untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki masyarakat sehingga diambil kesimpulan apabila perusahan dengan praktik *governance* yang baik akan menjadi perusahaan yang lebih baik lagi serta bertanggungjawab terhadap social dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menimbulkan adanya hubungan positif antara kualitas tata kelola perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik.

Tata kelola perusahaan yang dilakukan perusahaan berjalan dengan baik tentunya ini akan berhubungan dengan baiknya segala kegiatan perusahan salah satunya pengungkapan social responsibility berdasarkan teori legitimasi berfokus

pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. teori Legitimasi merupakan proses berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi ukuran kinerja lainnya yang berkaitan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan legitimasi perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial. Kegagalan untuk memenuhi harapan masyarakat akan mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kemudian akan berdampak terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan (Indrayenti dkk : 2018)

Menurut Antonio Dias, Lucia lima Rodrigues, Russel Craig (2017) bahwa:

"*the result say that CSRD is affected positively by board size, CEO duality, company size and industry type. This accords with suggestions implicit in stakeholder theory that a larger board will represent a broader diversity of stakeholders and will promote better monitoring, more assertive stakeholder management, greater transparency, and increased levels of CSRD. Larger companies and companies close-to-consumers are associated with high levels of CSRD, ostensibly because they are more visible and subject to greater societal monitoring during a period of financial crisis. We reveal that in a country characterized by high ownership concentration, CEO duality has a positive effect on CSRD.*

Menurut Farah & Grace (2017) bahwa :

"Pengungkapan informasi sukarela oleh perusahaan didasari kondisi bahwa parapengelola perusahaan memiliki informasi superior terhadap investor luar yang mengharapkan adanya kinerja perusahaandi masa mendatang (Healy dan Palepu,2000). Agar para pengelola perusahaan melakukan pengungkapan informasi sukarela, maka pemegang saham dapat mempengaruhinya melalui corporate board selain itu pengungkapan secara sukarela ini juga dapat didorong oleh keinginan dari pengelola perusahaan. Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa berbagai elemen CG mempengaruhi pelaporan CSR."

Menurut Ulfa Luthfia dan Arizal (2016) bahwa :

> "CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang semakin luas kepada masyarakat dan lingkungan. Pelaporan dan pengungkapan CSR juga dilakukan. Hal ini dilakukan dikarenakan perusahaan menginginkan legitimasi dan nilai positif dari masyarakat.
>
> Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dikaitkan dengan *corporate governance* dan karakteristik perusahaan. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* hal ini mengindikasikan pengaruh positif corporate governance terhadap pengungkapan CSR

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR

Tingkat profitabilitas perusahaan bisa mempengaruhi seberapa besar pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profit yang besar tentu akan dituntut untuk menjelaskan bahwa kegiatan perusahaan sejalan dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, dan apabila telah menyalahi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat tentu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung menyalurkan keuntungannya daripada perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah dengan melalui pengungkapan aktivitas CSR.

Berdasarkan *stakeholders theory*, kinerja ekonomi sebuah perusahaan dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam mengungkapan informasi CSR. Selanjutnya terdapat sebuah perkiraan pada ketika tingkat profitabilitas yang rendah yang dialami oleh perusahaan, tekanan dan permintaan ekonomi akan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pengeluaran untuk aktivitas CSR,dan juga, tingkat profitabilitas yang rendah akan berujung pada pengurangan kegiatan CSR.

Profitabilitas merupakan hal yang penting bagi keberlanjutan perusahaan tetapi tujuan perusahaan tidak hanya ditujukan untuk mencari profit saja, perusahaan juga wajib untuk mengungkapkan kegiatan CSRnya juga, untuk mengungkapkan csr para pemangku kepentingan (stakeholder) berperan penting bagi pengungkapan CSR.

Berdasarkan *stakeholders theory*, kinerja ekonomi sebuah perusahaan dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam mengungkapan informasi CSR. Selanjutnya terdapat sebuah perkiraan pada ketika tingkat profitabilitas yang rendah yang dialami oleh perusahaan, tekanan dan permintaan ekonomi akan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pengeluaran untuk aktivitas CSR,dan juga, tingkat profitabilitas yang rendah akan berujung pada pengurangan kegiatan CSR.

Menurut Julius (2016) bahwa :

> *“ ROE Influence on CSR Disclosure Company ROE is the ratio that indicates the company's ability to generate net income return on equity for shareholders. ROE is a financial ratio used to measure the level of profitability of the equity. The higher the ROE, the value of the company's performance can be said to be in good condition because of the increasing ratio means that good management performance in managing operational source of funding effectively to generate a net profit. According to Kumar and Singh (2013), ROE is always a concern for shareholders because through this ratio the shareholders will know how much profit is obtained in accordance with the share capital they have invested to management. “*

Menurut Yuliana&Herwanto (2017) bahwa :

> “Profitabilitas merupakan faktor yang dapat membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas. Berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal

yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca "good news" kinerja perusahaan."

Menurut Mirza Nurdin Nugroho, Agung Yulianto (2015), bahwa :

"Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba selama periode tertentu, yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan CSR. perusahaan di Indonesia akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial ketika memperoleh profit yang tinggi, sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin tinggi juga tingkat pengungkapan CSR.Profitabilitas yang tinggi menunjukkan ketersediaam dana yang lebih untuk melaksanakan CSR dan mengungkapkannya, sebagai bukti akuntabilitas kepada stakeholder dan meyakinkan bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat, hal ini mengindikasikan hubungan positif antara profitabilitas dengan pengungkapan *corporate social responsibility*."

Sesuai dengan judul penelitian "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR" maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

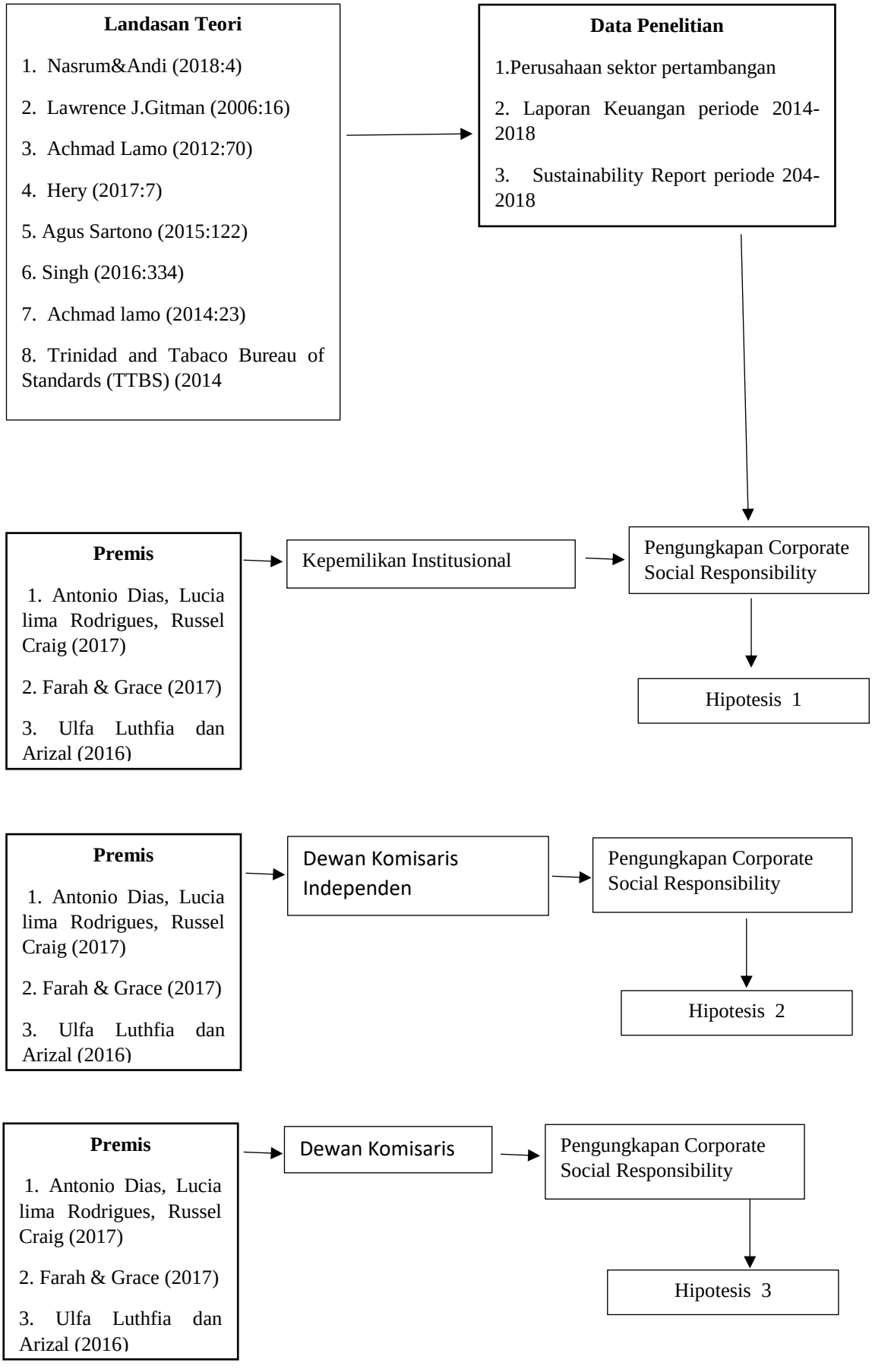
Landasan Teori
1. Nasrum&Andi (2018:4)
2. Lawrence J.Gitman (2006:16)
3. Achmad Lamo (2012:70)
4. Hery (2017:7)
5. Agus Sartono (2015:122)
6. Singh (2016:334)
7. Achmad lamo (2014:23)
8. Trinidad and Tabaco Bureau of Standards (TTBS) (2014
Data Penelitian
1.Perusahaan sektor pertambangan
2. Laporan Keuangan periode 2014-2018
3. Sustainability Report periode 204-2018
Premis
1. Antonio Dias, Lucia lima Rodrigues, Russel Craig (2017)
2. Farah & Grace (2017)
3. Ulfa Luthfia dan Arizal (2016)
Kepemilikan Institusional
Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Hipotesis 1
Premis
1. Antonio Dias, Lucia lima Rodrigues, Russel Craig (2017)
2. Farah & Grace (2017)
3. Ulfa Luthfia dan Arizal (2016)
Dewan Komisaris Independen
Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Hipotesis 2
Premis
1. Antonio Dias, Lucia lima Rodrigues, Russel Craig (2017)
2. Farah & Grace (2017)
3. Ulfa Luthfia dan Arizal (2016)
Dewan Komisaris
Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Hipotesis 3

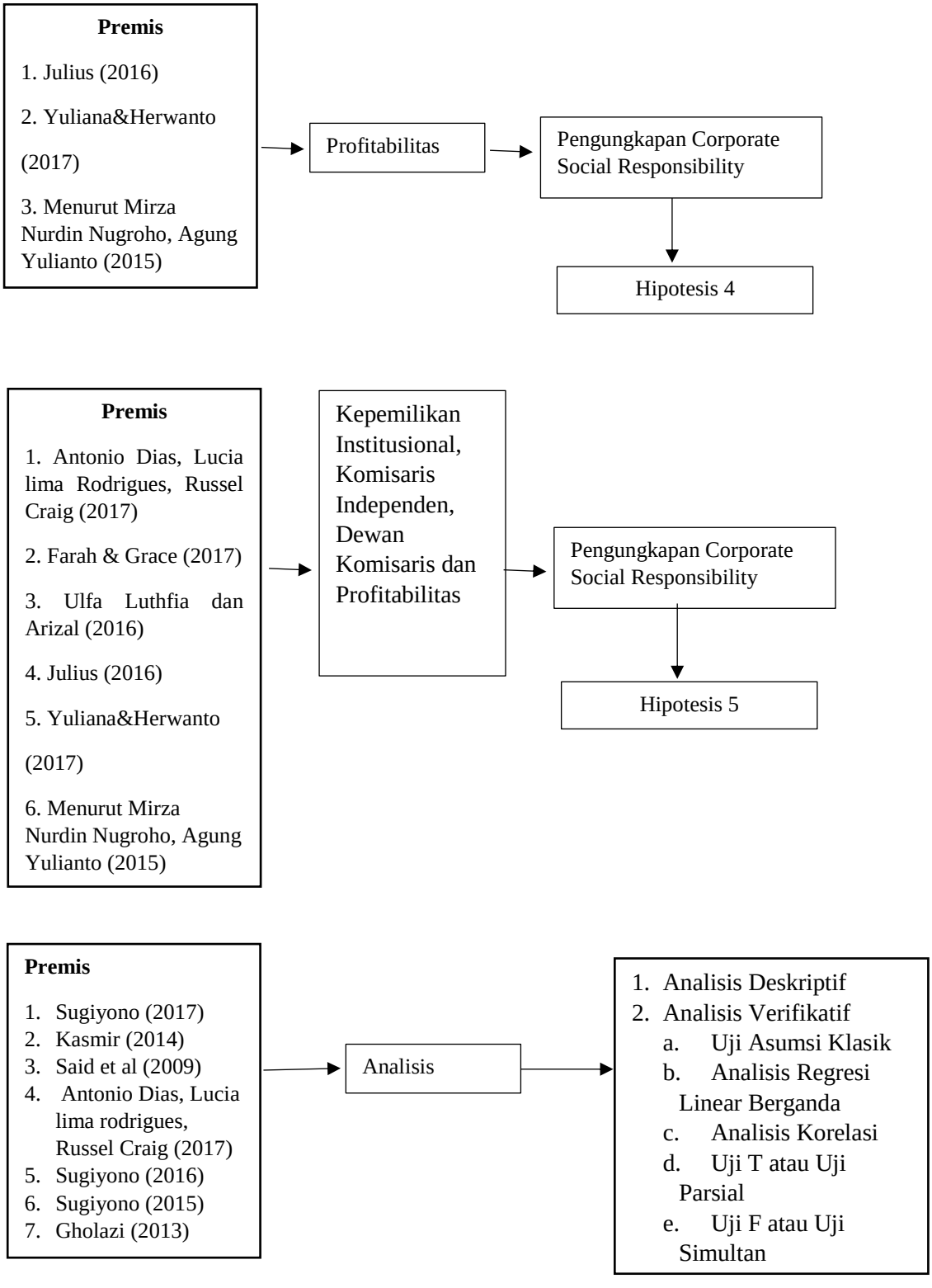

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:64) hipotesis diartikan sebagai:

> "... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pernyataan".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*" antara lain :

Secara Parsial :

Hipotesis 1 :"Terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Hipotesis 2 :"Terdapat pengaruh Komisaris Independen terhadapPengungkapan CSR."

Hipotesis 3 :"Terdapat pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR."

Hipotesis 4 :"Terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR."

Secara Simultan :

Hipotesis 5 :"Terdapat Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR."